

**PERLINDUNGAN HUKUM SATUAN POLISI  
PAMONG PRAJA SEBAGAI TENAGA KONTRAK  
BERDASARKAN SURAT EDARAN MENTERI  
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN  
REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR B/185/M.SM.02.02/2022 TENTANG STATUS  
KETENAGAAN DI LINGKUNGAN INSTANSI  
PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH**

**SKRIPSI**



Oleh :  
**SHONI EFENDI**  
NIM : 2019010034

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS GRESIK  
2023**

**PERLINDUNGAN HUKUM SATUAN POLISI  
PAMONG PRAJA SEBAGAI TENAGA KONTRAK  
BERDASARKAN SURAT EDARAN MENTERI  
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN  
REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR B/185/M.SM.02.02/2022 TENTANG STATUS  
KETENAGAAN DI LINGKUNGAN INSTANSI  
PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH**

**SKRIPSI**

**Disusun guna memperoleh gelar Sarjana Hukum  
pada Program Studi Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Gresik**



Oleh :  
**SHONI EFENDI**  
NIM : 2019010034

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS GRESIK  
2023**

## PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING

Judul Skripsi: **Perlindungan Hukum Satuan Polisi Pamong Praja Sebagai Tenaga Kontrak Berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor B/185/M.SM.02.02/2022 Tentang Status Ketenagaan Di Lingkungan Instansi Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah**

NAMA : SHONI EFENDI

NIM : 2019010034

Telah selesai dilakukan bimbingan dan dinyatakan layak dan memenuhi syarat dan menyetujui untuk di Uji pada tim Penguji Tugas Akhir pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Gresik

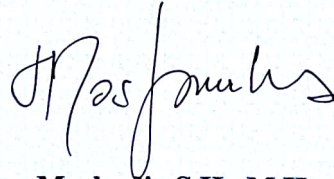
Gresik, 09 Juni 2023

Pembimbing I



**Dara Puspitasari S.H., M.H.**  
NIPY : 107102020210472

Pembimbing II



**Mashudi, S.H., M.H.**  
NIPY : 107102020160126

Mengetahui,  
Ketua Program Studi



**Dara Puspitasari S.H., M.H.**  
NIPY : 107102020210472

## PENGESAHAN TIM PENGUJI

Judul Skripsi      **Perlindungan Hukum Satuan Polisi Pamong Praja Sebagai Tenaga Kontrak Berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor B/185/M.SM.02.02/2022 Tentang Status Ketenagaan Di Lingkungan Instansi Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah**

NAMA                : SHONI EFENDI  
NIM                 : 2019010034

Telah dipertahankan/diuji dihadapan tim Penguji Tugas Akhir Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Gresik  
Pada tanggal: 20 Juni 2023

### PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS GRESIK TIM PENGUJI :

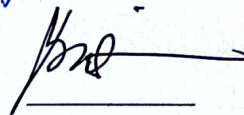
**1. Arkisman, S.H., M.H.**  
NIPY : 107102019890015  
Ketua.



**2. Zakiah Noer, S.H., M.Kn.**  
NIPY : 107102020180132  
Anggota.



**3. Abdul Basid, S.H., M.H.**  
NIPY : 107102020080045  
Anggota.



Mengetahui.  
Dekan.



**Rizki Kurniawan, S.H., M.Kn**  
NIPY : 107102020070040

## SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : SHONI EFENDI  
NIM : 2019010034  
Alamat : Sembunganyar RT 006 / RW 002 kel. Sembunganyar kec.  
Dukun  
Fakultas : HUKUM  
Program Studi : ILMU HUKUM  
Jenjang : S-1

Menyatakan bahwa Skripsi/Tugas Akhir yang saya buat dengan judul :

Perlindungan Hukum Satuan Polisi Pamong Praja Sebagai Tenaga Kontrak Berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor B/185/M.SM.02.02/2022 Tentang Status Ketenagaan Di Lingkungan Instansi Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah.

Adalah hasil karya saya sendiri dan bukan “duplikasi” dari karya orang lain. Sepengetahuan saya di dalam naskah Skripsi/Tugas Akhir ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain kecuali secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah Skripsi/Tugas Akhir ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur plagiasi, saya bersedia Skripsi/Tugas Akhir ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh **DIBATALKAN**, serta diproses sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dan tekanan dari pihak manapun.

Gresik, 06 Juli 2023

Yang menyatakan,



**SHONI EFENDI**  
**2019010034**

## **MOTTO**

**"Ada tiga tahapan penting untuk mencapai kesuksesan, yakni memiliki tujuan yang jelas, menggunakan cara yang baik, dan mempunyai semangat juang yang tinggi"**

**Andrie Wongso**

## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

Segala puji kepada Allah, Robb yang telah memberiku peluang kebaikan sehingga dapat mempersembahkan sebuah karya khusus untuk ayah, ibu, istri dan anakku tercinta yang senantiasa mendo'akan dari kejauhan, menanamkan kasih sayang, serta seluruh keluargaku dan saudara, Semua teman-teman terdekhatku yang selalu berdo'a dan memberikan semangat kepadaku tanpa lelah.

Ucapan terima kasih kepada bapak ibu dosen yang telah membimbing kami penuh kesabaran dan ketabahan, tak lupa juga ucapan terima kasih kepada seluruh teman seperjuangan Fakultas Hukum Universitas Gresik yang selalu memberi dukungan satu sama lain demi keberhasilan kita semua. Semoga Allah membalas semua itu dengan kemuliaan di dunia dan di akhirat. Aamiin. Yarobbalallamin.

## KATA PENGANTAR

*Assalamualaikum. WR. WB*

Alhamdulillah, Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmat, nikmat, dan serta karunia-Nya, sehingga Skripsi dengan judul “Perlindungan Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor B/185/M.SM.02.02/2022 Tentang Status Ketenagaan Di Lingkungan Instansi Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah“ dapat terselesaikan dengan baik.

Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Gresik. Selama menyusun skripsi ini, penulis telah banyak mendapatkan bimbingan, dukungan, saran dan bantuan dari berbagai pihak. Maka pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dan bimbingan dalam penyelesaian skripsi, yaitu kepada :

1. Ibu dr. Riski Dwi Prameswari, M.Kes selaku Rektor Universitas Gresik.
2. Bapak Rizki Kurniawan, S.H., M.Kn. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Gresik.
3. Ibu Zakiah Noer, S.H., M.Kn. selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Gresik.
4. Ibu Dara Puspitasari, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Gresik.
5. Ibu Dara Puspitasari, S.H., M.H, dan Bapak Mashudi ,S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing yang telah mencurahkan waktu, tenaga,



dan pikiran yang telah diberikan dalam membimbing dan mengarahkan penulis hingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

6. Semua Dosen dan seluruh staff Fakultas Hukum Universitas Gresik yang turut serta membantu terselesaikannya penulisan skripsi ini.
7. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan rekan-rekan Satpol PP Kabupaten Gresik yang telah membantu penulis menyelesaikan skripsi ini.
8. Kedua Orang tua tercinta yang telah memberikan doa serta dukungannya untuk menyelesaikan skripsi ini.
9. Istri tercinta Sholichatul Faiza dan anak saya Muhammad Dzikri Robby yang telah membantu serta memotivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Teman-teman seperjuangan Fakultas Hukum baik teman senangkatan maupun kakak kakak senior atas kebersamaan dan kerjasamanya selama menempuh pendidikan di Universitas Gresik.

Penulis menyadari bahwa Skripsi ini belum sempurna oleh karena itu, penulis senantiasa mengharapkan kritik dan saran yang membangun. Semoga Skripsi ini bermanfaat dan dapat digunakan sebagai tambahan informasi bagi semua pihak yang membutuhkan.

Gresik, Juli 2023

Penulis

## ABSTRAK

Penelitian ini membahas tentang perlindungan hukum satuan polisi pamong praja (Satpol PP) dan kedudukan satpol PP sebagai tenaga kontrak setelah di keluarkannya surat edaran menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi republik indonesia nomor B/185/M.SM.02.02/2022 tentang status ketenagaan di lingkungan instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Kedudukan dan perlindungan hukum pada satpol PP sebagai tenaga kontrak menjadi topik utama penelitian ini.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan melakukan analisis deskriptif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *statute approach*, *conseptual approach*, *historical approach*. Data yang digunakan bersumber dari perundang-undangan, studi kepustakaan, dan pendapat para sarjana.

Hasil penelitian ini menunjukkan; 1. Kedudukan Hukum dan Status Hukum Tenaga Kontrak dilihat dengan adanya peralihan aturan dari Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan diperkuat oleh Peraturan menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi republik Indonesia No. B/185/M.SM.02.02/2022 tentang status kepegawaian di lingkungan instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah membuat kedudukan tenaga kontrak menjadi hilang. Jika sebelumnya ada ketentuan peraturan untuk mengangkat tenaga kontrak yang dapat dijadikan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil, maka dalam ketentuan peraturan yang baru kedudukan tenaga kontrak menjadi hilang dan digantikan dengan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). 2. Tanggung jawab dan Perlindungan hukum yang diberikan pemerintah kepada Satpol PP sebagai tenaga kontrak yang bekerja di Kabupaten Gresik terdapat perbedaan, Hal ini disebabkan belum adanya aturan yang jelas tentang penetapan upah dan perlindungan hak buruh pegawai kontrak. Perlindungan yang diberikan pemerintah setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 dan dikeluarkannya Peraturan menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi republik Indonesia No. B/185/M.SM.02.02/2022 tentang status kepegawaian di lingkungan instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah, pemerintah masih belum mampu memberikan perlindungan hukum secara menyeluruh, khususnya dalam ketentuan ini, jabatan pegawai kontrak dihapus dan digantikan oleh PPPK.

**Kata Kunci: Satpol PP, Pegawai Kontrak, Perlindungan Hukum**

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN COVER.....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN FAKULTAS UNGGAH TUGAS AKHIR/KARYA ILMIAH MAHASISWA .....	iii
PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING .....	iv
PENGESAHAN TIM PENGUJI .....	v
KARTU BIMBINGAN TUGAS AKHIR.....	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS .....	vii
PERNYATAAN ORISINILITAS SKRIPSI.....	viii
MOTTO .....	ix
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	x
KATA PENGANTAR .....	x
ABSTRAK.. .....	xiii
<i>ABSTRACT</i> .. .....	xixiii
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	8
1.3 Tujuan Penelitian.....	8
1.4 Manfaat Penelitian.....	9
1.5 Tinjauan Pustaka.....	9
1.5.1 Landasan Konsep.....	10
1.5.1.1 Konsep Perlindungan Hukum.....	10
1.5.1.2 Konsep Kepegawaian .....	13
1.5.1.3 Konsep Tenaga Kontrak .....	14
1.5.1.4 Konsep Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).....	15
1.5.2 Landasan Yuridis .....	17
1.5.2.1 Landasan Yuridis Perlindungan Hukum.....	17
1.5.2.2 Landasan Yuridis Konsep Kepegawaian.....	18

1.5.2.3	Landasan Yuridis Konsep Tenaga Kontrak .....	19
1.5.2.4	Landasan Yuridis Konsep Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) .....	21
1.5.3	Landasan Teori .....	22
1.5.3.1	Teori Perlindungan Hukum .....	22
1.5.3.2	Teori Kepegawaian .....	25
1.5.3.3	Teori Tenaga Kontrak .....	25
1.5.3.4	Teori Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) .....	27
1.6	Metode Penelitian .....	28
1.6.1	Jenis Penelitian .....	29
1.6.2	Metode Pendekatan .....	29
1.6.3	Sumber bahan hukum .....	31
1.6.4	Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum .....	32
1.6.5	Teknik Analisis Bahan Hukum .....	33
1.7	Sistematika Penulisan .....	35
1.8	Penelitiann Terdahulu .....	36
BAB II .....		39
2.1.	Sejarah Satuan Polisi Pamong Praja .....	39
2.2.	Tugas, Fungsi dan Kewenangan Satuan polisi Pamong Praja .....	41
2.3.	Dasar Hukun Keberadaan Satuan polisi pamong Praja .....	42
2.4.	Kedudukan Satpol PP Sebagai Tenaga Kontrak Sebelum Di Terbitkannya Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor: B/185/M.SM.02.02/2022 Tentang Status Ketenagaan Di Lingkungan Instansi Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah. ....	44
2.5.	Kedudukan Satpol PP Sebagai Tenaga Kontrak Setelah Di Terbitkannya Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor: B/185/M.Sm.02.02/2022 Tentang Status Ketenagaan Di Lingkungan Instansi Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah .....	48
2.6.	Kedudukan Tenaga Kontrak Satpol PP di Kabupaten Gresik setelah di terbitkannya Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan	

Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor: B/185/M.SM.02.02/2022 tentang status ketenagaan di lingkungan instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah.....	58
BAB III.....	63
3.1 Perlindungan Hukum Tenaga Kontrak Satpol Pp.....	63
3.2 Hak Dan Kewajiban Satpol Pp Sebagai Tenaga Kontrak.....	72
3.3 Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kontrak Satpol PP di Kabupaten Gresik.....	73
BAB IV PENUTUP	
4.1 Kesimpulan.....	89
4.2 Saran.....	90

#### DAFTAR PUSTAKA

#### LAMPIRAN

Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi  
Birokrasi Republik Indonesia Nomor: B/185/M.SM.02.02/2022 Tentang  
Status Ketenagaan Di Lingkungan Instansi Pemerintah Pusat Dan  
Pemerintah Daerah  
Data Pegawai Satuan Polisi pamong Praja Kabupaten Gresik non ASN  
Bulan November 2022